

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia yaitu mencapai urutan ke-6 dunia setelah Amerika Serikat yaitu 17,503 pulau terhitung pada tahun 2020 hal ini bisa berubah seiring berjalannya waktu disebabkan karena hilangnya pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh pengikisan tanah oleh air laut yang bersifat menghabisi tanah di pesisir pantai (Liputan6.com 2020). Indonesia terletak di asia tenggara didukung dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga dapat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi dilingkungan masyarakat. Besarnya pusat perekonomian suatu wilayah dapat menimbulkan urbanisasi yang mengakibatkan berbagai masalah, karena tidak ada pengendalian dan pengawasan di dalamnya. Hal seperti ini yang sering terjadi dikebanyakan kota, seperti di Kota Batam saat ini. Terlalu banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan penumpukan sarana transportasi sehingga dapat mengakibatkan kemacetan dalam lalulintas.

Transportasi merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memindahkan manusia, hewan, maupun barang dari tempat awal menuju ke tempat lainya biasanya menggunakan bantuan hewan maupun mesin yang diatur oleh manusia. Pada hakikatnya transportasi digunakan oleh manusia untuk memperlancar dan mempercepat kegiatan yang dijalankan dalam setiap harinya. Bentuk dari terdapat tiga jenis transportasi yaitu transportasi darat, udara, dan laut.

Pada suatu wilayah kelancaran lalu lintas tidak terlepas dari pemerintah yang cepat dan tepat dalam mengambil tindakan, serta masyarakat yang mematuhi undang-undang dan peraturan daerah. Dalam mewujudkan kualitas angkutan umum yang baik sudah seharusnya jenis angkutan umum seperti Metro Trans, Bus Kota Dan Bus Trans sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah, pengawasan tersebut berupa uji layak jalan.

Uji layak jalan atau uji berkala ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu ada juga peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta jaringan transportasi jalan dan peremajaan, penambahan dan penghapusan kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kota Batam. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah transportasi akan semakin bertambah, hal tersebut biasa terlihat di wilayah perkotaan, jika masalah kemacetan tidak segera di tangani maka akan menimbulkan penumpukan transportasi di jalan.

Kota Batam merupakan pusat dari Kepulauan Riau, karena merupakan kota terbesar dari empat kota lainnya seperti Kota Bintan, Kota Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Lingga. Luas dari kota Batam sendiri mencapai 1,038,85 Km² dengan jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar hingga mencapai 1,196,397 Jiwa. Dari tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20,389 jiwa sampai tahun 2020. karena tidak menutup kemungkinan Batam merupakan kota industri yang letaknya sangat berdekatan dengan negara besar seperti

Singapura dan Malaysia yang memiliki sektor ekonomi yang cukup baik, sehingga tidak menutup kemungkinan akan bertambah banyak urbanisasi ke Kota Batam. Dalam aktifitas seperti ini pemerintah harus cepat bertindak karena dalam suatu wilayah pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, terutama dalam agenda pelayanan, sosialisasi, dan melakukan pengawasan harus selalu dilaksanakan karena besarnya jumlah penduduk memaksakan untuk menambah alat transportasi dan sangat mempengaruhi kemacetan lalu lintas.

Transportasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat membantu manusia dalam beraktifitas, terutama di Batam, angkutan umum biasa digemari oleh masyarakat karena biaya transportasinya yang relatif murah. Bentuk dari angkutan umum yang ada di Batam ada yang berbentuk trayek dan non trayek. Angkutan umum trayek juga bervariasi, ada yang bentuk Bus kota, Bus Trans Batam, dan Metro trans, non trayek Taksi, jenis Bus Kota sendiri memiliki tiga rute tujuan utama yaitu bus biru dari Jalan Dapur Dua belas Sagulung sampai ke Nagoya melalui Batam Center, untuk bagian trayek bimbar berwarna merah dari Jalan Dapur Duabelas Sagulung, selanjutnya ke Nagoya melalui jalur Suka Jadi, dan yang terakhir untuk rute bus Kota merah muda dari Jodoh menuju ke Nongsa melalui Batam Center.

Pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting demi keamanan dan penertiban berlalu lintas sehingga masyarakat dapat dengan nyaman ketika berada didalam transportasi umum serta kelancaran dan keamanan di jalan. Dinas Perhubungan dalam hal ini sangat mengantisipasi

bertambahnya angkutan umum yang tidak melakukan uji layak jalan, maka dari instansi tersebut memberikan himbauan dengan peraturan daerah bahwa harus ada pemutihan dan peremajaan angkutan umum untuk keamanan dan kenyamanan berlalulintas yaitu dengan melakukan pengandangan angkutan umum yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang sehingga masyarakat dengan aman, nyaman dan tenang dalam menaiki angkutan umum.

Jika pemerintah ingin melakukan peremajaan dan mengandangan kendaraan umum maka pemerintah harus melakukan tindakan, tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi juga memberikan solusi bagaimana angkutan umum tersebut bisa di remajakan kembali. Bisa dilakukan kerja sama antara pemerintah Kota Batam dan perusahaan angkutan umum untuk membantu memberikan dana kepada perusahaan angkutan umum dan perusahaan melakukan pembayaran pajak sebagai imbalanya, sehingga dampaknya yaitu masyarakat dengan nyaman menggunakan angkutan umum, perusahaan mendapatkan citra yang baik oleh retribusi kepada pemerintah, tidak terlepas melakukan uji layak jalan selama 6 bulan sekali. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka angkutan umum akan terus mengalami kenaikan tidak layak jalan dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Angkutan Umum Dalam Trayek di Kota Batam Tahun 2018-2020

No.	Jenis Angkutan Trayek Utama	Masa Lama Oprasi	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Layak Usia Operasi	Maksimal, 18 Tahun	271	261	224
2.	Habis Usia Operasi	Lebih Dari, 18 Tahun	346	356	393
Jumlah			617	617	617
No.	Jenis Angkutan Trayek Cbang	Masa Lama Oprasi	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Layak Usia Operasi	Maksimal, 15 Tahun	269	202	142
2.	Habis Usia Operasi	Lebih Dari, 15 Tahun	1476	1543	1603
Jumlah			1745	1745	1745

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020.

Dalam permasalahan yang diakibatkan oleh angkutan umum jenis trayek utama tidak melakukan uji KIR terlihat dari bodi kendaraan yang keropos, ada juga yang bodi kendaraan miring. Disebutkan bahwa angkutan umum trayek utama yang tidak melakukan layak uji jalan terhitung dari keseluruhan rute utama terdapat 617 tercatat beroperasi, jumlah angkutan umum yang habis usia oprasi dari Tahun 2018-2019 tercatat 10 unit kendaraan, sedangkan dari Tahun 2019-2020 tercatat 37 unit kendaraan yang habis usia oprasi. Trayek cabang dari tahun 2018-2020 yang habis usia oprasi sebanyak 127 kendaraan selama 3 tahun terakhir. Dari keseluruhan angkutan umum yang layak usia oprasi yang rutin melakukan uji layak jalan hanya sebanyak 60 kendaraan saja. Dinas Perhubungan juga rutin melakukan razia selama setiap bulanya, selain itu juga sudah memanggil badan usaha untuk melakukan sosialisasi terhadap angkutan umum tersebut tidak terlepas didampingi oleh pihak kepolisian. Dinas perhubungan juga sudah pernah melakukan pengandangan terhadap angkutan umum yang tidak layak uji jalan, karena ada rasa jiwa sosial maka peraturan yang telah dibuat tidak diterapkan. (TribunBatam.id 2020).

Menurut Farida, masalah yang dihadapi terhadap transportasi bus Kabupaten Garut sering mengalami kecelakaan lalulintas jalan disebabkan oleh *human error*. Strategi yang dapat dilakukan yaitu penetapan dalam bentuk sistem manajemen kendaraan angkutan umum, berupa pemeriksaan angkutan umum di area terminal, dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan dalam bentuk pengamatan, inspeksi, sarana dan prasarana, audit, serta pelaksanaan penegakan hukum dilapangan. Dalam penerap terhadap angkutan umum harus melakukan uji kelayakan jalan, mengharuskan pengusaha angkutan menerapkan sistem manajemen keselamatan angkutan umum serta pelaksanaan perizinan angkutan umum diperketat (Farida 2018:216).

Menurut pendapat (Sonya Sulistyono, Ludfi Djakfar 2017:108) dari hasil penelitian tersebut kinerja pelayanan yang mengakibatkan tumpang tindih trayek merupakan masalah dasar pada transportasi umum Kota Jember, terutama dari segi pengawasan dan perencanaan perbaikan pelayanan yang masih rendah. Dalam melakukan penataan ulang jaringan trayek yang dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan angkutan umum pada daerah Kota Jember.

Pada hari Rabu 2 Oktober 2018 sebuah bus kota (Dapur 12) BP 7282 DU terjadi kecelakaan di bukit daeng, Tembesi, di area Dam Muka Kuning, bus tersebut lepas kendali dan menabrak lampu jalan dan terguling dan mengakibatkan satu orang penumpang patah kaki akibat dari kejadian tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut angkutan umum tersebut sudah tidak melakukan uji layak jalan selama satu tahun lebih. Pada Selasa 8 Januari 2019 seorang

pengendara sepeda motor dengan nama inisial (WM) tewas di tabrak angkutan umum jenis bimbar dengan nomor kendaraan BP 7264 DU. Kecelakaan tersebut terjadi di simpang Kepri Mall, Jalan Sudirman, Batam, Kepulauan Riau.(wartarakyat.co.id 2020)

Permasalahan yang terjadi pada senin 17 februari 2020 angkutan umum jenis bus kota BP 7601 DU mengakibatkan kecelakaan lalulintas di jalan Letjen R. Suprpto (bukit daeng) Batu Aji Kota Batam, yang menabrak dua sepeda motor dan satu orang meninggal dunia supir angkutan umum tersebut di vonis lima tahun penjara. dipastikan tidak mengikuti uji layak jalan, karena setelah diselidiki ternyata angkutan tersebut lampu penerangan mati, tidak dilengkapi lampu sen, dan rem depan dan belakang tidak berfungsi secara normal, (BatamPos.co.id 2020).

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi maka dapat dilakukan penelitian dalam menelusuri serta memahami bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap angkutan umum di Kota Batam. Sehingga peneliti dapat mengangkat judul “Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam”.

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi maka dapat dilakukan penelitian dalam menelusuri serta memahami bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap angkutan umum di Kota Batam. Sehingga peneliti dapat mengangkat judul **“Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari hasil pembahasan yang telah dibuat dilatar belakang , penulis mampu merumuskan identifikasi permasalahan yaitu :

1. Jumlah angkutan umum semakin banyak di Kota Batam
2. Tingginya jumlah dari umur angkutan umum yang melebihi usia operasi.
3. Banyaknya angkutan umum yang tidak melakukan uji KIR (UJI layak jalan) di Kota Batam.
4. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum.

1.3. Batasan Masalah

Fokus yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Uji Layak Jalan (KIR) angkutan umum di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau. Kegiatan di lapangan tidak lepas dari pihak kepolisian Satlantas Polresta Barelang dalam melakukan penertiban angkutan umum.

1.4. Rumusan Masalah

Dari rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai tugas akhir adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam ?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah disampaikan dari perumusan tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengawasan dinas perhubungan terhadap uji layak jalan angkutan umum Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat yang dialami Dinas Perhubungan terhadap masyarakat (pengusaha angkutan) dalam melakukan pengawasan uji layak jalan angkutan umum Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang pengawasan dinas perhubungan dalam uji layak jalan angkutan umum yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang didapat secara teoritis terhadap hasil dari penelitian ini memperluas pengetahuan ilmu Administrasi Negara yang memiliki keterkaitan dengan Pengantar Manajemen, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Manajemen Pelayanan Publik.

2. Manfaat Praktis

Untuk bisa memahami pengawasan Dinas Perhubungan terhadap uji layak jalan angkutan umum Kota Batam dengan efektif, kemudian meningkatkan pengetahuan, daya berfikir, dan menganalisa secara sistematis, serta dalam melaksanakan penelitian untuk menciptakan tulisan dalam bentuk karya ilmiah.

